

DISKURSUS POLEMIK KEDAULATAN PANGAN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Muchammad Fajar Aminnullah¹, Yeby Ma'asan Mayrudin²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia ^{1,2}

E-mail: 6670190081@untirta.ac.id¹; yeby@untirta.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika ketahanan pangan di Indonesia selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dilatarbelakangi oleh kebijakan strategi kebijakan pangan penelitian ini mencoba untuk menggambarkan potret realitas ketahanan pangan selama masa Pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori, yaitu Teori Ketahanan Pangan dari Charles Peter Timmer dan Teori Implementasi Kebijakan dari Merilee Serrill Grindle, dan menggunakan metode Studi Kasus Intrinsik dari John Creswell. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pemerintahan Jokowi dalam mencapai ketahanan pangan dipenuhi oleh problematika yang melibatkan dimensi politik, konflik hak ulayat, dan dominasi kepentingan korporasi. Meskipun dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti program Nawa Cita dan Upsus Pajale, serta proyek Food Estate, namun sering kali cenderung mendukung korporasi dan kepentingan politik tertentu, bahkan dalam konteks impor pangan di tengah panen raya. Analisis perspektif makro Timmer menyoroti upaya dalam peningkatan produksi lokal dan stabilitas harga, namun pandangan Grindle menunjukkan kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan yang menyulitkan pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sejati. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai ketahanan pangan pada masa pemerintahan Jokowi, dengan implikasi penting bagi perumusan kebijakan di masa depan.

Kata Kunci: Dimensi Politik, Ketahanan Pangan, Kepentingan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems of food security in Indonesia during the leadership of President Joko Widodo. Motivated by Nawa Cita policy, policy inconsistencies, massive food import decisions, and less than optimal government attention to agricultural land and farmers, this study tries to portray a portrait of the reality of food security during Joko Widodo's leadership. This research uses two theoretical frameworks, namely Food Security Theory from Charles Peter Timmer and Policy Implementation Theory from Merilee Serrill Grindle, and uses the Intrinsic Case Study method from John Creswell. The results of this research reveal that the Jokowi administration's efforts towards achieving food security are fraught with issues involving political dimensions, conflicts over indigenous rights, and corporate interests domination. Despite being pursued through various initiatives such as the Nawa Cita and Upsus Pajale programs, as well as the Food Estate project, they often tend to favor corporations and certain political interests, even in the context of food imports during harvest seasons. Timmer's

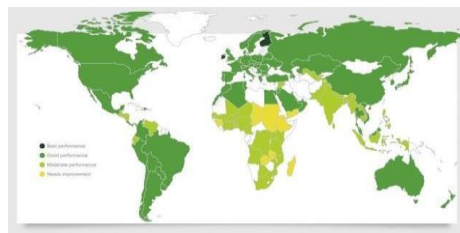
macro perspective analysis highlights efforts to increase local production and price stability, yet Grindle's viewpoint exposes a gap between policy and on-ground realities, making it challenging to achieve true food security and food sovereignty. Overall, this research underscores the complexity and challenges faced in striving for food security during the Jokowi administration, with significant implications for future policy formulation.

Keywords: *Politics Dimension, Food Security, Interest.*

PENDAHULUAN

Krisis pangan telah menjadi sorotan utama, dengan peningkatan jumlah orang kekurangan gizi selama pandemi *Covid-19* yang mencapai 768 juta, setara dengan 10 persen dari populasi dunia (Arndt, 2020; Farcas, 2020; Hamadani, 2020; Mishra & Rampal, 2020; Nchanji, 2021; Nurrohman & Mayrudin, 2021). Penduduk Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara, menunjukkan tingkat kekurangan gizi tertinggi, sementara laporan Indeks Kelaparan Global 2021 mengungkapkan bahwa 50 negara mengalami tingkat kelaparan yang serius (Ghaedi, 2021; Harahap, 2021; Tempo.co, 2021). Indeks ketahanan pangan global menyoroti lambannya perbaikan keseluruhan dalam ketahanan pangan dan peningkatan harga pangan secara global, yang diperparah oleh kehadiran pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, yang menguji sistem pangan dan memperburuk ketidaksetaraan sosial secara tidak proporsional (Timmer, 2012; GFSI, 2019; GFSI, 2020). Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar. 1 Peta Ketahanan Pangan Global 2020



Sumber: (GFSI, 2020)

Dalam peta tersebut, menunjukkan ketidakstabilan indeks ketahanan pangan global meningkat, terutama dipicu oleh kombinasi perubahan iklim, pertanian intensif, dan pandemi *Covid-19* (Prilliadi, 2021). Negara-negara seperti Finlandia, Irlandia, dan Belanda menonjol dengan tingkat ketahanan pangan tertinggi, sementara Zambia, Sudan, dan Yaman masih berjuang dengan tingkat yang rendah (GFSI, 2020; GFSI 2021; GFSI 2022). Meskipun Indonesia berada di tengah-tengah, namun nyatanya masih berada di bawah negara-negara seperti Turki yang menunjukkan tingkat ketahanan yang lebih baik (Anggela, 2022; World Bank 2022).

Di Asia dan Pasifik, paradoks ketahanan pangan menciptakan frustrasi karena pergeseran peran dari stimulus ekonomi menjadi respons politik

terhadap transformasi struktural, yang menimbulkan tantangan bagi efisiensi ekonomi (Timmer, 2014; Timmer, 2017). Meskipun sejumlah negara berhasil meningkatkan indeks ketahanan pangan mereka, seperti Jepang dan beberapa negara lainnya dalam empat tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan dan masih memiliki problematika yang belum terselesaikan, mencerminkan kompleksitas dan urgensi isu ketahanan pangan dalam konteks global yang tercermin dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (GFSI, 2019; GFSI, 2020; GFSI 2021; GFSI, 2022). Selain menjadi isu ekonomi, ketahanan pangan juga merupakan hak asasi manusia yang terabaikan, menegaskan perlunya perhatian dan tindakan lebih lanjut dalam menangani masalah ini secara holistik (Khairunnisa & Wibowo, 2021; De Carvalho et.al 2021; Santander Trade Markets, 2021).

Problematika ketahanan pangan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan, badai, dan banjir (Mayrudin et.al, 2022). Pertambahan populasi dan konversi lahan pertanian menjadi sektor lain juga menjadi penyebab utama (Molotoks, Smith & Dawson, 2021). Di tengah kondisi ini, masuknya pandemi *Covid-19* semakin memperparah stabilitas pangan, yang tercermin dari penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks

Ketahanan Pangan Global serta prediksi pertumbuhan populasi yang signifikan (Ghaedi, 2021; Hadyan, 2021; Molotoks, 2021).

Diskursus tentang ketahanan pangan telah menjadi isu utama dalam Pembangunan nasional Indonesia dari era Soekarno hingga Joko Widodo (BPS, 2020; Salasa, 2021). Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, impor beras sebesar 2,2 juta ton pada tahun 2015 senilai sekitar USD 1 miliar menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik (Rachman & Ariani, 2022). Kemudian, dengan tujuan meningkatkan produksi pangan dan mengurangi angka kemiskinan, Joko Widodo memberlakukan proyek *Food Estate* kembali setelah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Fahira et al., 2022). Berikut analisis komparatif dari (Fahira et al., 2022), mengenai perbandingan *Food Estate* SBY dan Jokowi.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan *Food Estate*

Susilo Bambang Yudhoyono	Joko Widodo
1. Krisis pangan dan energi global 2007-2008. 2. Sejalan dengan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2005-2009.	1. Krisis pangan global 2020. 2. Sejalan dengan RPJPN 2005-2025.
1. <i>Master Plan</i> Percepatan dan Perluasan Ekonomi (MP3E1). 2. RPJMN 2010-2014. 3. Merauke Food and Energy Estate (MIFEE). 4. Kementerian Pertanian, BUMN, dan sektor swasta.	1. Proyek Strategis Nasional 2020-2024. 2. RPJMN 2020-2024. 3. Perkebunan Pangan. 4. Kementerian Pertahanan, Pertanian, BUMN, PUPR, dan sektor swasta. 5. Pengembangan lahan 10.000 ha/area

5. Pembukaan lahan di 16 Kabupaten Merauke seluas 1,23 juta ha. 6. Targetkan surplus beras 10 ton pada 2014.	2.000 ha/cluster, dan alokasi 4,3 juta ha di Kalteng 6. Target pengembangan food estate tercatat di 5 lokasi.
1. Hanya 400 ha lahan yang berhasil dimanfaatkan (0,03%). 2. Masalah perampasan tanah.	1. Total lahan seluas 165.000 ha telah ditanami sejak tahun 2020. 2. Masalah perampasan tanah.
1. Surplus hanya 2 juta di tahun 2014 (20%). 2. Skor kelaparan Indonesia tahun 2014 berdasarkan GHI 10.3 (Moderat).	1. Baru 3 lokasi yang dikembangkan dan bermasalah di Papua. 2. Skor kelaparan Indonesia 2021 berdasarkan GHI 18 (Moderat).

Sumber: (Fahira et al., 2022)

Proyek *Food Estate* di era SBY dan Jokowi menunjukkan perbedaan tujuan krisis serta peran militer dalam pengelolaan lumbung pangan di bawah pemerintahan Jokowi (Fahira et al., 2022). Meskipun fokus Presiden Jokowi terhadap kedaulatan pangan tercermin dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terlihat adanya inkonsistensi terlihat dalam penerapan Omnibus Law yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya (Soleman & Noer, 2017; Hastangka, 2020). Hadirnya Upsus Pajale (Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai) sebagai manifestasi Nawa Cita dengan terpusat pada produksi padi, jagung, dan kedelai dengan target yang diatur melalui keputusan resmi untuk mencapai swasembada pada tahun tertentu (Benu & Kumaat, 2017; Rezky & Alam, 2019).

Dalam implementasinya tersebut terdapat kendala seperti ketidakminatan petani terhadap tanaman selain padi,

dikarenakan harganya yang rendah, serta alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali (detikNews, 2018; Koranbanten.com, 2021). Meskipun impor beras meningkat, terutama dari Vietnam dan Thailand, fluktuasi impor beras menunjukkan ketidakstabilan pasokan dalam negeri (BPS, 2022; Republika.co, 2022). Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga menandakan tantangan utama dalam mencukupi kebutuhan pangan domestik (Ariska & Qurniawan, 2021).

Kasus lainnya seperti pada konflik Rusia-Ukraina memperjelas ketergantungan Indonesia sebagai importir pangan, terutama gandum dan kedelai yang sebagian besar diperoleh dari kedua negara tersebut, sehingga meningkatkan harga pangan di dalam negeri (Izuddin et al., 2022). Data dari Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa cadangan pangan Indonesia hanya cukup untuk bertahan selama 21 hari, jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand (Tempo.co, 2022). Pemerintahan Jokowi telah memulai pembangunan *Food Estate* dengan tujuan meningkatkan produksi pangan dan memperkuat cadangan pangan nasional (Permana, 2022).

Kritik terhadap kebijakan *Food Estate* yang dilontarkan oleh Angga Hermanda, Ketua Departemen di Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, menyoroti dampak negatifnya seperti konflik agraria,

kerusakan keanekaragaman hayati, dan penggusuran petani kecil menjadi buruh (Hermanda, 2022). Meskipun Nawa Cita dianggap sebagai implementasi Trisakti Soekarno, namun dalam praktiknya lebih condong kepada sistem liberal, menunjukkan kesenjangan

antara retorika dan kenyataan (Suryana, 2014; Mayrudin et al., 2022). Polemik ketahanan pangan yang kompleks ini menjadi fokus dalam jurnal dengan judul “*Diskursus Polemik Kedaulatan Pangan pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.*”

KAJIAN PUSTAKA

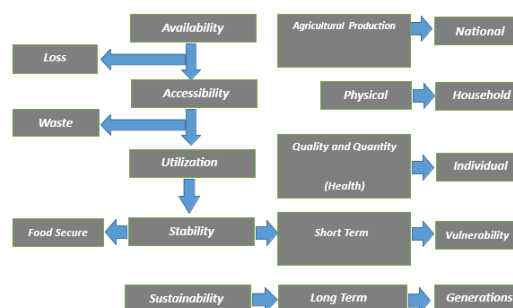
Ketahanan Pangan Charles Peter Timmer

Pada awal tahun 1970-an, krisis pangan global mendorong munculnya konsep ketahanan pangan, menekankan ketersediaan pangan dan stabilitas harga sebagai respons terhadap volatilitas ekstrem pasar (Berry et al., 2015). Definisi ini berevolusi dari fokus ketersediaan menjadi inklusi akses ekonomi terhadap pangan, memperluas pemahaman tentang kompleksitas interaksi individu hingga tingkat global (Peng, 2018). Ketahanan pangan kini diartikan sebagai jaminan bahwa setiap orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk hidup sehat dan aktif dari berbagai kondisi (Coleman-Jensen et al., 2017).

Keabstrakan definisi ketahanan pangan telah dijelaskan dengan lebih mudah dimengerti melalui lima dimensi oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang ditekankan oleh Elliot Berry, yaitu Ketersediaan; Aksesibilitas; Pemanfaatan; Stabilitas; dan Keberlanjutan (Berry et al., 2015). FAO menekankan ketersediaan pangan dan aksesibilitasnya, baik secara fisik maupun ekonomi, serta pentingnya

aspek sosial-budaya untuk memastikan pangan dapat diterima secara budaya. Selain itu, pemanfaatan pangan yang mencakup kuantitas dan kualitasnya bersama dengan stabilitas sistem rantai pangan menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Berikut penjelasan dalam jalur dimensi ketahanan pangan *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang diadaptasi lebih lanjut oleh Elliot Berry.

Gambar. 2 Jalur Dimensi Ketahanan Pangan FAO



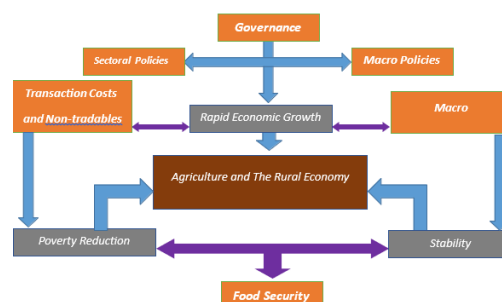
Sumber: (Diadaptasi dari FAO, 2008; dalam Berry et al., 2015)

Diskursus tentang ketahanan pangan semakin diperkaya dengan dimensi perilaku, yang menekankan pentingnya perilaku individu dan rumah tangga dalam menghadapi krisis pangan (Timmer, 2012). Konsep ini juga mencakup dimensi non-perilaku, seperti dimensi kategoris, sosio-organisasional,

manajerial, dan situasional, yang bersama-sama membentuk model teoretis ketahanan pangan (Gross, et.al., 2000). Dalam model ini, sub-dimensi sosio-organisasional melibatkan analisis pada berbagai level, dari tingkat makro hingga mikro, yang semuanya memengaruhi stabilitas pangan (Hardianto, 2017).

Diskusi mengenai ketahanan pangan suatu negara tidak terlepas dari relevansi dengan kebijakan publik (Timmer, 2004). Kebijakan publik terkait ketahanan pangan dapat dipahami sebagai rentang spektrum mulai dari aspek mikro yang menitikberatkan pada kesejahteraan individu dan jaring pengaman sosial, hingga aspek makro yang menggaransi pasokan pangan secara teratur di pasar nasional maupun internasional (Gross, et.al., 2000; Timmer, 2012; Hardianto, 2017). Dalam konteks tersebut, kerangka dasar memahami masalah ketahanan pangan menurut (Timmer, 2017), memberikan pandangan yang komprehensif terhadap upaya pendek dan panjang dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan. Hal tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dalam penggambaran perspektif makro terhadap determinan ketahanan pangan dari diagram berikut.

Gambar. 3 Perspektif Makro Ketahanan Pangan



Sumber: (Timmer, 2004)

Pada pemahaman genealogi ketahanan pangan yang disampaikan oleh Charles Peter Timmer, terlihat jelas bahwa upaya menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan intervensi untuk meningkatkan ketahanan pangan merupakan kunci dalam mengatasi kemiskinan, terutama di negara-negara Asia Timur dan Tenggara (Gross, et.al., 2000; Timmer, 2012; Hardianto, 2017). Dengan mengadopsi perspektif makro terhadap determinan ketahanan pangan menurut (Timmer, 2004), Pemerintah Jokowi dapat merancang kebijakan pangan yang koheren dan berkelanjutan. Hal ini membantu meningkatkan ketahanan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun nasional serta memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan standar hidup (Timmer, 2017).

Implementasi Kebijakan Merilee Serrill Grindle

Pemerintah memiliki peran sentral dalam menangani masalah-masalah publik yang membutuhkan tindakan publik untuk mencapai solusi (Easton, 1971; Hoogerwerf, 1983; Dunn, 1994). Dalam konteks tersebut, kebijakan

publik menjadi instrumen utama yang disusun oleh badan-badan pemerintah dan pejabatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (Tachjan et al., 2006). Implementasi kebijakan merupakan tahap praktis yang tak terpisahkan dari formulasi kebijakan, memegang peranan krusial dalam mencapai tujuan kebijakan dan merupakan bagian dari tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu (Grindle, 1980; Dunn, 1994; Mubarak et al., 2020). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar. 4 Tiga Elemen Sistem Kebijakan

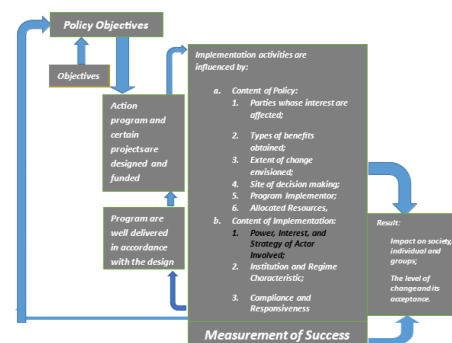


Sumber: (Diadaptasi dari Dunn, 1994; dalam Tachjan et al., 2006)

Tiga pendapat dari (Edward, 1980; Mazmanian & Sabatier, 1983; dan Grindle, 1980), memberikan wawasan berbeda mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Edward menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, kecenderungan, perilaku, dan struktur birokrasi sebagai penentu utama keberhasilan. Sementara itu, Mazmanian & Sabatier memperhatikan karakteristik masalah, kebijakan, dan lingkungan sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan formal kebijakan. Di sisi lain, Grindle menyoroti pentingnya kesesuaian kebijakan dengan

implementasi yang tepat sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Berikut implementasi kebijakan menurut (Grindle, 1980).

Gambar. 5 Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber: (Grindle, 198)

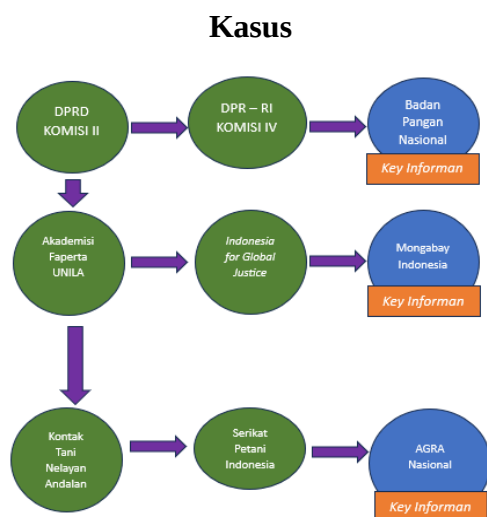
Dalam pandangan (Grindle, 1980), keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur melalui pencapaian tujuan akhirnya yang dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Model implementasi tersebut menekankan pentingnya memperhitungkan sumber daya dalam isi kebijakan dan mempertimbangkan peran kelembagaan serta strategi aktor dalam konteks implementasi (Mubarak et al., 2020). Dengan mengadopsi teori Grindle, penelitian tentang ketahanan pangan pada masa Pemerintahan Jokowi dapat menggali dinamika kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik (Creswell, 2015), guna memperoleh pemahaman

mendalam mengenai masalah ketahanan pangan dalam konteks kebijakan Pemerintahan Joko Widodo. Peneliti mengawali dengan mengeksplorasi minat dan ketertarikan terhadap kasus yang dipilih, kemudian merumuskan masalah penelitian dengan menggunakan data dan kajian literatur yang relevan (Creswell, 2013). Analisis tema kasus dilakukan dengan mengintegrasikan potret dan realisasi kebijakan dalam konteks ketahanan pangan, serta menggali aspek mendasar atau penyebab terjadinya kasus tersebut melalui studi literatur yang mendalam. Berikut alur pendekatan dari studi kasus.

Gambar. 6 Alur Pendekatan Studi Kasus



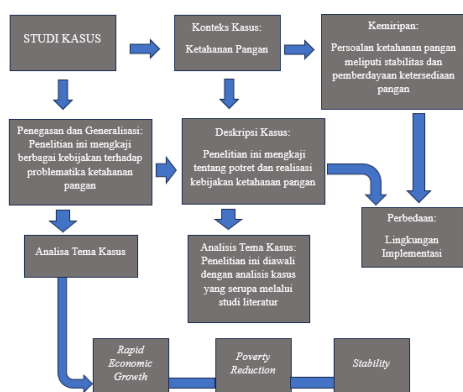
Sumber: (Diolah Penulis, 2023)

Penelitian ini menguraikan relevansi antara tema *Rapid Economic Growth*, *Poverty Reduction*, dan *Stability* dalam konteks ketahanan pangan di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Timmer, 2004; Timmer, 2012). Terdapat korelasi yang

signifikan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan kebutuhan pangan domestik, yang diperkuat oleh program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rusdiana & Maesya, 2017). Selain itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan diintegrasikan dengan strategi ketahanan pangan, sementara stabilitas pangan dan aksesibilitasnya menjadi fokus dalam mekanisme jaring pengaman selama krisis pangan. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menyoroti potret realitas problematika ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dalam penelusuran lebih lanjut, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, termasuk studi literatur, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2015). Berdasar studi literatur, penulis merujuk pada penelitian terdahulu dalam karya (Timmer, 2004; dan Grindle, 1980), untuk memperkuat argumen. Wawancara dilakukan dengan metode *snowball sampling*, mulai dari informan awal hingga informan kunci, dengan menggunakan teknik *exponential discriminative snowball sampling* untuk mencari rekomendasi informan selanjutnya. Dokumentasi juga dilakukan melalui analisis studi kepustakaan dan media berita untuk mendukung pemahaman tentang problematika ketahanan pangan (Creswell, 2013). Informan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar. 7 Skema Snowball Sampling



Sumber: (Diadaptasi dari Creswell, 2015; kemudian diolah Penulis, 2024)

Penulis mengikuti pendekatan analisis data yang terstruktur sesuai dengan metodologi yang digunakan (Creswell, 2015). Langkah-langkahnya mencakup persiapan data melalui penyusunan transkrip wawancara dan pertanyaan dari berbagai sumber, yaitu Badan Pangan Nasional, AGRA Nasional, Serikat Petani Indonesia, Staf Ahli Fraksi PKS, *Indonesia for Global Justice*, dan Mongabay Indonesia, kemudian dijelaskan secara menyeluruh tentang temuan dalam bentuk narasi kualitatif. Dengan demikian, penelitian dapat menyajikan informasi yang jelas dan relevan mengenai ketahanan pangan Indonesia dan implementasi kebijakan pangan Jokowi.

Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan keabsahan data dengan memeriksa dan memvalidasi data dari berbagai sumber, metode, dan waktu pencarian. Dengan menerapkan triangulasi data, peneliti mengumpulkan informasi dari *multiple*

sources sebagai strategi untuk memverifikasi keandalan data. Penelitian ini dilaksanakan dari Januari 2023 hingga April 2024, dengan lokasi penelitian disesuaikan berdasarkan kebutuhan, baik melalui wawancara langsung maupun daring, sesuai dengan keberadaan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pra Pemerintahan Joko Widodo

Sebelum Indonesia merdeka, problematika ketahanan pangan telah menjadi perhatian utama dalam kehidupan politik dan ekonomi nasional di masa kolonial Belanda maupun Jepang (Suryana, 2008; Manurung & Rezasyah, 2021). Kebijakan tanam paksa Belanda, bersama dengan kebijakan Jepang selama pendudukan, mengakibatkan penindasan dan kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat, termasuk pembatasan perdagangan bahan pangan dan wajib serah padi (Sondarika, 2015; Rahman, 2016; Mardatila, 2020). Namun, dengan kemerdekaan Indonesia, harapan akan kedaulatan dan kemampuan mengatur kebijakan pangan sendiri terwujud, memandu bangsa ini ke arah masa depan yang lebih berdaulat dan mandiri secara pangan (Permadi, 2015).

Pasca kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi tantangan ketahanan pangan akibat ekonomi yang belum stabil serta ketergantungan pada ekspor komoditas, dan infrastruktur yang tidak memadai (Supriyono, 2016). Presiden

Soekarno berupaya mengatasi hal tersebut melalui kebijakan komprehensif seperti reforma agraria, investasi dalam pertanian, dan program bantuan pangan, namun gejolak politik internal memengaruhi efektivitasnya (Nawiyanto, 2013; Rahman, 2016). Krisis ekonomi di akhir pemerintahannya menandai ketidakseimbangan antara ambisi politik dan realitas ekonomi, mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia (Saragih, 2017).

Pada awal masa pemerintahannya, Soeharto dengan cepat merespons tantangan ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia pasca-konflik dengan mengimplementasikan kebijakan seperti *Food Estate* dan program Swasembada Beras (Prasetyani & Widiyanto, 2013; Simanjuntak & Erwinsyah, 2020). Meskipun berhasil mencapai swasembada beras, kebijakan-kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak lingkungan negatif dan meningkatkan ketergantungan ekonomi pada impor serta beban utang, yang berkontribusi pada kemunduran pemerintahannya (Saragih, 2017). Akhirnya, krisis ekonomi Asia 1997 menjadi puncak ketidakstabilan politik dan ekonomi, mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri pada Mei 1998 dalam respons terhadap tuntutan reformasi yang meluas dari masyarakat (Suryawati, 2019).

Saat awal kepemimpinannya, BJ. Habibie menghadapi beragam masalah pangan yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama terkait ketidakstabilan ekonomi politik (Suryana et al., 2014). Kebijakan-kebijakan seperti bantuan pangan, peningkatan produksi pertanian, dan pengembangan infrastruktur pertanian guna memudahkan akses petani ke pasar (Salasa, 2021). Namun tantangan depresiasi nilai rupiah, tingginya inflasi, ketergantungan pada impor pangan, serta kurangnya koordinasi antar sektor, membuat upaya BJ. Habibie dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia terhambat, diperparah oleh perubahan iklim dan bencana alam yang mengakibatkan keruntuhan pemerintahannya (Saragih, 2017).

Selama masa pemerintahan Presiden Abdurraman Wahid (Gus Dur), kebijakan pangan Indonesia mencerminkan upaya keras dalam mengelola ketahanan pangan (Supriyono, 2016). Gus Dur mengambil langkah-langkah tegas, seperti mengendalikan liberalisasi pasar beras melalui tarif impor yang spesifik serta memutuskan hubungan dengan *International Monetary Fund* (IMF), dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan nasional (Purwaatmoko, 2015). Meskipun mendapat kritik, terutama terkait efektivitas kebijakan liberalisasi pasar, keputusan-keputusan tersebut membentuk landasan penting dalam

perdebatan kebijakan pangan Indonesia pada masa itu (Suryana et al., 2014).

Setelah Gus Dur lengser, Megawati Sukarnopuri menerapkan kebijakan penting seperti penataan tata niaga gabah dan beras sesuai Inpres No. 9 Tahun 2002 serta pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) untuk mengatasi masalah pangan (Sastrosupadi, 2019). Meskipun berhasil mengakhiri kerja sama dengan IMF dan melarang impor beras, kendali pemerintahannya terhambat oleh hambatan politik dan birokrasi, serta dominasi oligarki, yang memengaruhi peningkatan tarif impor beras dan kesejahteraan petani (Kelana & Khusniah, 2015). Keberhasilannya dalam kebijakan pangan tidak mampu menjamin dukungan politik yang cukup, sehingga Pemerintahan Megawati berakhir setelah kalah dalam pemilu 2004, membuka era baru dalam politik Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Saragih, 2017).

Kebijakan ketahanan pangan SBY terutama dalam Food Estate, mencerminkan pergeseran proaktif dalam pendekatan terhadap keamanan pangan di Indonesia (Putri, 2019). Kebijakan tersebut menuai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat adat, menyoroti kompleksitas tantangan dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan (Simamora et al., 2021). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan berkelanjutan

dalam pengembangan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia (Dewi, 2016; Salasa, 2021).

Program Nawa Cita

Setelah terpilih sebagai presiden pada pemilu 2014, Jokowi dan Jusuf Kalla mengintegrasikan gagasan Trisakti ke dalam Nawa Cita sebagai strategi utama pemerintahannya, dengan fokus pada merestorasi kewibawaan negara, memperkuat perekonomian nasional, dan menangani intoleransi (Soleman & Noer, 2017). Program Nawa Cita mencerminkan visi komprehensif untuk pembangunan, terdiri dari sembilan prioritas yang menekankan kedaulatan pangan dan penguatan ekonomi domestik (Hasan, 2017; Indonesia.GO.ID, 2017). Komitmen terhadap kedaulatan pangan tercermin dalam tantangan pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh kondisi global, iklim, dan keterbatasan lahan (Syamsi, 2015; Kominform.go.id, 2017; Kurniawan et al., 2018). Alur pemikiran Jokowi-JK dalam Nawa Cita dapat dilihat berdasarkan gambar berikut.

Gambar 8. Alur Pemikiran Jokowi-JK dalam Nawa Cita



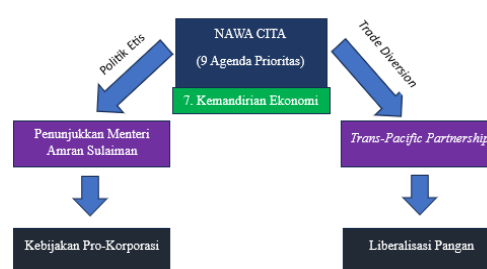
Sumber: (Diadaptasi dari Soleman & Noer, 2017 dan diolah oleh Penulis, 2024)

Poin ketujuh dalam Nawa Cita menekankan kemandirian ekonomi nasional melalui sektor-sektor strategis domestik, terutama dalam mencapai ketahanan pangan untuk memastikan keamanan pangan bagi seluruh rakyat (Aziz, 2018). Upaya ini difokuskan pada meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta memanfaatkan potensi ekonomi lainnya melalui inovasi dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup di sektor pangan dan perikanan (Hasan, 2017). Meskipun demikian, implementasi reformasi agraria untuk mencapai tujuan ini dihadapkan pada kendala birokrasi kompleks, konflik pengakuan hak ulayat, dan tantangan dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi penerima sertifikat tanah (Syamsi, 2015).

Aliansi untuk Kedaulatan Pangan di Indonesia mengkritik penunjukkan Menteri Pertanian dari kalangan korporasi seperti Amran Sulaiman yang dipandang cenderung pro-korporasi dan mengabaikan kepentingan petani kecil serta nelayan (viva.co.id, 2014; Widyastuti, 2018). Kekhawatiran juga timbul terkait liberalisasi pangan yang didorong oleh perjanjian perdagangan internasional, seperti *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang mengancam kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia (Binadesa.org, 2014; CNN Nasional, 2017). Meskipun

Nawa Cita Jokowi-JK awalnya dipandang sebagai kritik terhadap model liberalisasi ekonomi, kesepakatan Indonesia terhadap TPP pada 2015 menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan implementasi agenda-agenda reforma agraria dan kedaulatan pangan (Soleman & Noer, 2017). Berdasarkan pembahasan tersebut, realisasi Program Nawa Cita dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 9. Realisasi Program Nawa Cita



Sumber: (Diolah Penulis, 2024)

Ketertarikan Indonesia bergabung dengan TPP muncul di saat kunjungan Presiden Jokowi ke Gedung Putih pada Oktober 2015 (Indonesia For Global Justice, 2015; Badan Standardisasi Nasional, 2016; Nita, 2016). Namun, komitmen tinggi terhadap liberalisasi TPP yang melampaui *World Trade Organization* (WTO) dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional dengan membatasi regulasi internal, seperti penyelesaian sengketa investasi yang berpotensi membatasi kebijakan nasional (Soleman & Noer, 2017; Binadesa.org, 2014). Hal tersebut berdampak pada realisasi Nawa Cita terbatas oleh konsep liberalisasi yang

mendominasi, sehingga berimplikasi pada ketimpangan sosial-ekonomi, terutama di pedesaan, dan ketergantungan pada impor pangan serta distribusi yang tidak merata (Rahmadi, 2015; Angga, 2023).

Upsus Pajale

Program Upsus Pajale merupakan inisiatif Pemerintahan Presiden Jokowi dalam mencapai tujuan ketujuh Nawa Cita yang fokus pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai (Bappenas, 2014; Kementerian Pertanian, 2019). Berbagai kegiatan seperti rehabilitasi irigasi, pengelolaan tanaman terpadu, dan optimalisasi lahan dengan kerja sama bersama perguruan tinggi dan TNI Angkatan Darat (Shafiani, 2019; Purnamasari et al., 2023). Dengan capaian dari tahun 2015 hingga 2019, Upsus Pajale sebagai manifestasi swasembada pangan diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan, serta pendapatan petani (Zulfitriyana et al., 2020; Sinaga, 2023). Lebih lanjut, keterangan dalam produksi dari padi, jagung, dan kedelai dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2. Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai 2015-2019

Pangan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Beras	ton	75,01 juta	79,14 juta	47,31 juta	32,42 juta	31,31 juta
Jagung	ton	20,3 juta	23,58 juta	27,95 juta	30 juta	22,59 juta
Kedelai	ton	963,1 ribu	859,7 ribu	538,7 ribu	983 ribu	490 ribu

Sumber: (BPS, 2019)

Dalam periode 2015 hingga 2019, produksi bahan makanan pokok di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan dengan penurunan drastis produksi beras dari 79,14 juta ton pada tahun 2016 menjadi hanya 31,31 juta

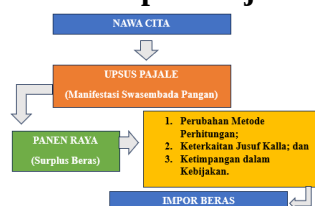
ton pada tahun 2019. Sementara itu, produksi jagung menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai puncaknya di 30 juta ton pada tahun 2018, sebelum turun menjadi 22,59 juta ton pada tahun 2019. Meskipun kedelai juga mengalami fluktuasi dengan produksi turun dari 963,1 ribu ton pada tahun 2015 menjadi 490 ribu ton pada tahun 2019, setelah mencapai puncak produksi 983 ribu ton pada tahun 2018 (Bappenas, 2019; BPS, 2019; Kementerian Pertanian, 2019).

Data produksi dan konsumsi beras nasional selama tahun 2015-2019 menunjukkan adanya surplus beras di Indonesia, namun keputusan untuk melakukan impor beras telah menurunkan harga gabah di tingkat petani (Kementerian Pertanian, 2019). Perselisihan data antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka produksi beras menimbulkan ketidaksesuaian dalam kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh perbedaan metode pengambilan sampel (Margianto, 2015; Haryanto, 2018). Jusuf Kalla bahkan mengadakan rapat untuk menekankan pentingnya konsistensi data untuk menghindari kesalahan kebijakan di masa mendatang (Gewati, 2018; Kusumah, 2019; Gusman, 2022).

Perubahan metode pengukuran produksi beras dari metode *Eyes Estimate* menjadi metode *Kerangka Sampling Area* (KSA) tampak jelas dari perbedaan dalam pencatatan, pengumpulan data, dan instrumen yang

digunakan (BPS, 2018; Tirto.id, 2022). Polemik data produksi beras yang terjadi selama bertahun-tahun banyak perhatian dikarenakan ketidakmampuan BPS dalam mempertanggungjawabkan data tersebut (Margianto, 2015; Haryanto, 2018, Arie, 2024). Keterkaitan antara BPS dan Jusuf Kalla juga dalam konteks perubahan metode pengukuran tersebut juga menjadi perhatian, terutama ketika impor beras diputuskan berdasarkan data baru yang dirilis oleh BPS dengan metode KSA (Sukmana, 2016; Hydayat, 2017; Widyastuti, 2018). Sajian dinamika impor beras di saat panen raya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 10. Dinamika Impor Beras di Saat Upsus Pajale



Sumber: (Diolah Penulis, 2024)

Dinamika impor beras di saat panen raya menyoroti ketimpangan dalam proses kebijakan yang diduga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, terutama dari pihak-pihak seperti Jusuf Kalla yang memiliki kepentingan dalam perusahaan ekspor-impor (Kusumah, 2019; Maulana, 2024). Kritik terhadap urgensi cadangan stok beras sebagai egosentris para elit pemerintah yang ingin berbisnis dengan rakyatnya menambahkan dimensi kontroversial terhadap kebijakan impor tersebut

(Kaskus.com, 2021). Selain itu, ketidakselarasan koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya fokus pada upaya mewujudkan swasembada pangan, tercermin dari hasil yang belum memuaskan dari program Upsus Pajale (Margianto, 2015).

Impor Pangan

Kebijakan impor pangan yang masif di masa Jokowi menegaskan urgensi kesesuaian antara produksi dan kebutuhan sebagai faktor krusial dalam isu ketahanan pangan (Shafiani, 2019; Idris, 2022; Ratnawati, 2023). Meskipun dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim dan peningkatan permintaan konsumen, impor tetap diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pangan tertentu seperti beras, gandum, gula, dan daging (Kusumah, 2019; Zulfetriyana et al., 2020; Purnamasari et al., 2023). Belum lagi Jokowi pernah berjanji untuk menghentikan impor pangan demi mendukung petani lokal dan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor (Idris, 2020).

Rekam jejak impor komoditas pangan Pajale Indonesia dari 2015 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan puncak impor terjadi pada tahun-tahun awal dan kemudian mengalami penurunan stabil (BPS, 2022). Direktur Bulog, Budi Waseo menyoroti bahwa kendala utama dalam mencapai ketahanan pangan adalah masalah distribusi dan

aksesibilitas yang diyakini terkait dengan keberadaan mafia pangan (Destrianita, 2017; Rohmaniyah, 2020). Kasus korupsi yang melibatkan pejabat Bulog selama periode 2001-2016 menunjukkan kebutuhan akan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyelewengan dengan peran politik dan ekonomi turut berperan dalam dinamika tersebut (Margianto, 2015; Gewati, 2018; Kusumah, 2019).

Polemik seputar mafia pangan mencuat sebagai isu yang mengkhawatirkan dengan dugaan keterlibatan mereka dalam berbagai praktik tidak jujur demi keuntungan pribadi bahkan dengan kerja sama birokrat dalam pembuatan kebijakan (DetikFinance, 2014; Hermenda, 2023). Contoh konkret terlihat dalam kebijakan impor beras di Indonesia bahwa kartel diduga memiliki pengaruh besar hingga melanggar regulasi yang memperpanjang rantai distribusi dan menimbulkan ketidaksetujuan di antara sebagian elit pemerintah (Destrianita, 2017; Laucereno, 2018). Meskipun diakhirinya disetujui oleh presiden, kritik terhadap kebijakan tersebut tidak surut menyoroti pandangan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan petani dan meminimalisir intervensi dari elit politik (dpr.go.id, 2018; Rohmaniyah, 2020; Danang, 2024).

Penelitian oleh (Kusumah, 2019), menampakan dinamika perseteruan antara berbagai aktor pemerintahan dalam kebijakan impor beras

menunjukkan adanya pertarungan antara kepentingan melindungi petani dan memperoleh akses impor. Analisis terhadap posisi dan kepentingan para aktor ini dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap kebijakan yang diimplementasikan (Margianto, 2015; Arie, 2024). Meskipun rencana impor beras pada tahun 2021 untuk stabilisasi harga dan cadangan pangan, tetapi akhirnya dibatalkan oleh Presiden Jokowi untuk menghindari perdebatan yang melibatkan elit DPR dari PDIP dan PKS (Jalal, 2022; Gusman, 2022). Dimensi politik atas perencanaan dan pelaksanaan impor pangan pada Pemerintahan Jokowi dapat dilihat dalam sajian berikut.

Gambar. 11 Dimensi Politik Impor Pangan Jokowi



Sumber: (Diolah Penulis, 2024)

Keterkaitan antara kebijakan impor pangan Jokowi dengan *World Trade Organization* (WTO) menjadi kompleks dengan dilatarbelakangi oleh gugatan Amerika Serikat terhadap undang-undang nasional yang mendukung produksi mandiri petani (Indonesia For Global Justice, 2020). RUU Cipta Kerja pun disinyalir sebagai

upaya halus pemerintah untuk menutupi kepentingan ekonomi-politik di baliknya, meskipun dipandang sebagai ancaman bagi kedaulatan pangan nasional oleh beberapa pihak (Maulana, 2024). Dinamika kebijakan ini mencerminkan ironi yang mengakibatkan sulitnya Indonesia mencapai kedaulatan pangan, disebabkan oleh egosektoral dan tekanan dari kebijakan internasional, serta peran liberalisasi impor pangan yang dapat mengarah pada dominasi investasi asing (Kusumah, 2019).

Proyek Food Estate

Pada September 2020, Indonesia mengalami krisis pangan akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan lonjakan jumlah keluarga miskin meningkat (BPS, 2020; Rasman et al., 2023). Presiden Jokowi memulai program *Food Estate* untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun proyek ini mengalami hambatan di Kalimantan Tengah, dengan permasalahan mulai dari kegagalan panen hingga dampak negatif terhadap masyarakat Dayak, disebabkan oleh kekurangan sosialisasi dan masalah pelaksanaan (Mutia et al., 2022; Pasaribu, 2023). Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk memperluas proyek ini ke lima provinsi lainnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Thomas, 2021).

Proyek *Food Estate* di Sumatera Utara menghadapi tantangan terkait

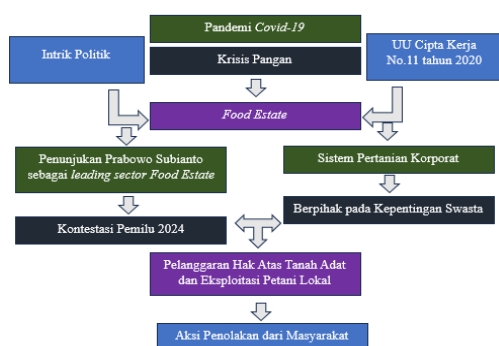
kurangnya perlindungan atas masyarakat adat Kabupaten Humbang Hasundutan, serta ancaman terhadap nilai budaya dan tradisi pertanian lokal (Stefany, 2021; Wicaksono, 2020). Sementara di Sumatera Selatan, meskipun mencatat surplus produksi beras, proyek ini menimbulkan ketidakadilan bagi petani yang hanya dimanfaatkan dalam tahap tengah sistem pertanian (Mutia et al., 2022). Di Nusa Tenggara Timur juga, kegagalan proyek disebabkan oleh kendala teknis dan kurangnya keterlibatan serta koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat (Syafuddin et al., 2023).

Kasus *Food Estate* di Papua seluas 2.684.680,68 hektar menuai kritik tajam karena terletak di kawasan hutan, mengancam keanekaragaman hayati, dan melegalkan deforestasi (Elisabeth, 2021; Simamora et al., 2021). Kegagalan proyek ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan matang, ketidakmampuan petani dalam mengelola lahan, serta konflik hukum akibat kepemilikan lahan yang tidak sah (Ihsanuddin, 2020; Priatmojo & Aulia, 2022). Pemerintah seharusnya perlu evaluasi dengan benar atas perencanaan serta pelaksanaan proyek *Food Estate* di masa depan (Lasminingrat & Efriza, 2020).

Proyek *Food Estate* di era Jokowi melahirkan keterkaitan yang kuat dengan militer, khususnya melalui penunjukkan Prabowo Subianto sebagai *leading sector* yang memicu

kekhawatiran terhadap toleransi terhadap oposisi akar rumput dalam pertanian (Jong, 2020; Walhi Kalimantan Tengah, 2021). Meskipun Presiden Jokowi mengklaim penunjukan Prabowo bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, beberapa pihak mengkritik langkah ini sebagai pengulangan kesalahan masa lalu yang menekan petani (CNBC Indonesia, 2020). Selain itu, proyek ini juga dinilai memiliki motif politik, dengan spekulasi bahwa pemerintah menggunakan kesuksesannya untuk mendukung elektabilitas Prabowo dalam Pemilu 2024, merenggangkan hubungan dengan PDIP, dan menciptakan aliansi politik yang kontroversial (BBC News Indonesia, 2023; Danang, 2024; Arie, 2024). Dimensi politik dari proyek *Food Estate* dapat lebih disimak dalam sajian pada gambar berikut.

Gambar. 12 Dimensi Politik *Food Estate* Jokowi



Sumber: (Diolah Penulis, 2024)

Proyek *Food Estate* yang digadang sebagai solusi atas krisis pangan seakan hancur lembur dalam implementasinya karena dilatarbelakangi kepentingan

ekonomi maupun politik (Mongabay Indonesia, 2023). Keikutsertaan militer nyatanya untuk menjaga korporasi dan investor, sehingga petani yang seharusnya diuntungkan malah menjadi pihak yang dirugikan (Gaudart & Pasha, 2024). Belum lagi urusan intrik politik dari Presiden Jokowi kepada Prabowo yang semakin memperjelas carut marut dan menyebabkan masyarakat menggelar aksi penolakan (Walhi Kalimantan Tengah, 2021).

Pembahasan

Telaah Kebijakan Pangan Jokowi dalam pandangan Timmer

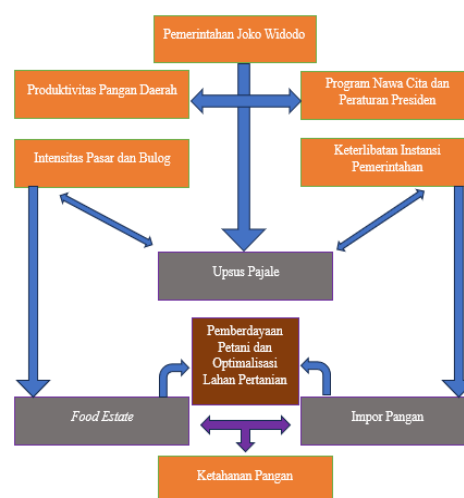
Dalam konteks ketahanan pangan perspektif makro Timmer, menyoroti pentingnya integrasi aktivitas ekonomi nasional terutama melalui sektor pertanian dan ekonomi pedesaan yang menjadi pilar utama dalam mencapai ketahanan pangan nasional (Timmer, 2004). Kebijakan makro dan sektoral yang efektif, seperti Program Nawa Cita Jokowi, pemerintah berupaya meningkatkan produksi lokal yang mengurangi ketergantungan impor, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan (Timmer, 2012; Timmer 2014). Upaya-upaya ini, termasuk reformasi agraria dan penyerahan sertifikat hak atas tanah, menjadi langkah krusial dalam mendukung ketahanan pangan yang kokoh serta pemerataan ekonomi di Indonesia (Syamsi, 2015; Hasan, 2017; Kurniawan et al, 2018).

Upsus Pajale dalam Nawa Cita menekankan pertumbuhan ekonomi cepat melalui sektor pertanian yang sesuai dalam pandangan (Timmer, 2004), sebagai kunci bagi kesejahteraan ekonomi makro dengan peningkatan produktivitas pertanian (Bappenas, 2014). Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan krisis pangan dan peningkatan jumlah keluarga miskin, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan proyek *Food Estate* sebagai respons terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (BPS, 2020; Rasman et al, 2023). Dalam perspektif makro, Food Estate tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga menjadi strategi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Timmer, 2012; Mutia et al., 2022).

Kebijakan impor pangan yang dipertahankan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan kesesuaian antara upaya meningkatkan produksi pangan lokal melalui program Upsus Pajale dan kebutuhan akan stabilitas harga pangan. Langkah-langkah ini, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif makro oleh (Timmer, 2004), merupakan strategis dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan fokus pada pengendalian harga beras sebagai komoditas pangan pokok. Meskipun terjadi peningkatan produksi lokal, kebijakan impor tetap relevan dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan di

Indonesia. Analisa ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar. 13 Analisa dalam Kacamata Timmer



Sumber: (Diadaptasi dari Timmer, 2004; diolah oleh Penulis, 2024)

Dalam hal ini, kebijakan makro ditandai dengan Program Nawa Cita dan Peraturan Presiden, juga fokus pada sektoral dipengaruhi produktivitas pangan daerah yang memumpuni kapasitas pertanian di desa. Sementara itu, kebijakan pangan Jokowi tidak terlepas dari peran Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertahanan, serta keterlibatan Bulog dalam intensifikasi pasar. Secara keseluruhan pemerintahan Jokowi mempunyai banyak inisiatif ketahanan pangan seperti Upsus Pajale, pemberdayaan petani, optimalisasi lahan pertanian, impor pangan, proyek Food Estate, dan memberikan pandangan yang mendalam tentang pendekatan beragam untuk mengatasi tantangan di bidang pangan.

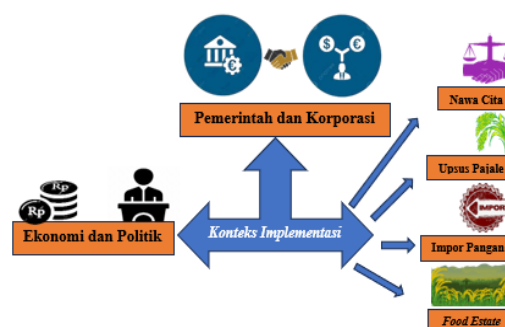
Bauran Inkonsistensi Kebijakan Pangan dalam Analisa Grindle

Setelah menganalisis strategi kebijakan pangan Jokowi, penulis menerapkan cara pandang (Grindle, 1980), implementasi di lapangan yang memperhatikan tujuan dan sasaran, serta mempertimbangkan peran lembaga dan strategi aktor terlibat, sesuai dengan teori konteks implementasi kebijakan. Kompleksitas redistribusi tanah dan konflik hak ulayat menunjukkan ironi dalam pelaksanaan program Nawa Cita, terutama dengan penunjukkan Menteri Pertanian dari kalangan korporasi yang berpotensi menyebabkan konflik kepentingan terkait liberalisasi pangan (CNN Nasional, 2017). Meskipun Nawa Cita menekankan kritik terhadap model liberalisasi ekonomi, keterlibatan Indonesia dalam TPP menimbulkan risiko terhadap tujuan kemandirian ekonomi yang diinginkan (Rahmadi, 2015).

Kritik terhadap kebijakan impor beras dalam program Upsus Pajale, dipicu oleh ketidaksesuaian data produksi antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik, serta diperparah oleh keterkaitan Jusuf Kalla dengan perusahaan ekspor-impor, mengindikasikan motivasi egosentris para elit pemerintah dan mencoreng cita-cita swasembada pangan (Grindle, 1980; Musilah et al., 2021). Dimensi politis dalam kebijakan impor beras era Jokowi mencerminkan inkonsistensi kebijakan, konflik kepentingan elit

pemerintahan terkait swasembada pangan, serta tekanan dari kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) yang memunculkan RUU Cipta Kerja (Kusumah, 2019; Rohmaniyah, 2020). Selain itu, proyek *Food Estate* sebagai upaya pengentasan kemiskinan dianggap lebih mementingkan kepentingan korporasi daripada nasib petani, ditambah drama politik penunjukkan Prabowo sebagai *leading sector* yang memperdalam ketidakpercayaan masyarakat dan memicu kekecewaan sebagai repetisi kesalahan rezim Orde Baru (Lasminingrat & Efriza, 2020; Elisabeth, 2021). Analisa ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar. 14 Analisa dalam Kacamata Grindle



Sumber: (Diadaptasi dari Grindle, 1980; diolah oleh Penulis, 2024)

Analisis implementasi kebijakan pangan pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo menggambarkan dimensi politik yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, di mana korporasi memainkan peran penting. Meskipun strategi seperti reformasi agraria dan peningkatan swasembada

pangan terdapat dalam rancangan, namun hambatan seperti birokrasi, konflik lahan, dan kurangnya koordinasi antarlembaga menghambat implementasinya. Kritik terhadap kebijakan ini menyoroti kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas lapangan, menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan yang sesungguhnya.

KESIMPULAN

Perjalanan Indonesia dalam memenuhi ketahanan pangan dari masa kolonial hingga era reformasi telah diwarnai oleh berbagai problematika, termasuk dalam masa pemerintahan Joko Widodo. Meskipun dilakukan upaya peningkatan produksi lokal dan stabilitas harga, kebijakan pangan Jokowi cenderung terkendala oleh dimensi politik, konflik hak ulayat, dan dominasi kepentingan korporasi, serta dipengaruhi oleh perjanjian perdagangan internasional. Sebagai hasilnya, terlihat bahwa cita-cita ketahanan pangan seringkali terpisah dari realitas lapangan, menunjukkan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan pencapaian yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino. (2021). *Sistem Tanam Paksa: Latar Belakang, Aturan, Kritik, dan Dampak*. Kompas.Com.
- Ariska, F. M., & Qurniawan, B. (2021). Perkembangan impor beras di Indonesia. *Journal of Agriculture and Animal Science*, 1(1), 27–34.
- Arie. (2024). Transkrip Wawancara Mongabay Indonesia.
- Aziz, A. (2018). Politik Ekstratif Dalam Kebijakan Pangan: Sebuah Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Badan Standardisasi Nasional. (2016). *Trans Pacific Partnership (TPP)*, Siapkah Indonesia Bergabung? Badan Standardisasi Nasional. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/7516/trans-pacific-partnership-tpp-siapkah-indonesia-bergabung>.
- Bappenas. (2014). *Laporan Kinerja*.
- Bappenas. (2019). *Laporan Kinerja*.
- BBC News Indonesia. (2023). PDIP sebut food estate ‘kejahatan lingkungan’ – manuver politik atau peduli isu lingkungan? BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpez33wgvw7o>
- Binadesa.org. (2014). *Nawa Cita Kedaulatan Pangan dan Visi Kemaritiman Jokowi diragukan konsistensinya*.
- Biro Humas Setjen Kementan. (2020). Menteri Pertahanan RI Sebagai Leading Sector Dalam Pengembangan Food Estate Bekerjasama Dengan Menteri PUPR dan Mentan. *Kementerian Pertahanan*.
- Booth, A. (1998). Penilaian Kembali Konsep Involusi dalam Sejarah Ekonomi Indonesia. *LP3ES*.
- BPS. (2016). *Data Statistik Indonesia*.
- BPS. (2019). *Data Statistik Indonesia*.
- BPS. (2020). *Data Statistik Indonesia*.
- BPS. (2021). *Indikator Pertanian*.
- BPS. (2022). *Data Statistik Indonesia*.
- BPS. (2022). *Indikator Pertanian 2022*.

- Bulog. (1971). Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-Butir Beras. *Jakarta*.
- CNBC Indonesia. (2020). Ini Alasan Presiden Tunjuk Prabowo di Proyek Food Estate. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200714094642-8-172464/ini-alasan-presiden-tunjuk-prabowo-di-proyek-food-estate>
- CNN Nasional. (2017). Walhi Nilai Reforma Agraria Jokowi-JK Belum Jamin Kesejahteraan. *Redaksi-Nasional*.
- Damanik, S. (2016). Keterkaitan Ketahanan Pangan dengan Kemiskinan Berdasarkan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*.
- Danang. (2024). Transkrip Wawancara Staf Ahli PKS.
- Destrianita. (2017). Kartel Beras, KPPU Curigai Penyalahgunaan Rantai Distribusi. *Tempo.Co*.
- DetikFinance. (2014). Menilik Kesamaan 4 Mafia yang Muncul di Debat Cawapres. *Detik.Com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-isnis/d%022623958/menilik-kesamaan-4-mafia-yang-muncul-di-debat-cawapres.%0A>
- Dewan Ketahanan Pangan. (2006). Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. *Jakarta*.
- Dewi, R. (2016). Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke. *Jurnal Penelitian Politik*.
- dpr.go.id. (2018). Kapasitas Produksi Sangat Besar, Mestinya Tak Perlu Impor Beras.
- Elisabeth, A. (2021). Walhi: Hutan dan Masyarakat Adat Papua Terancam Proyek Food Estate. *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*. <https://www.mongabay.co.id/2021/08/03/walhi-hutan-dan-masyarakat-adat-papua-terancam-proyek-food-estate/>
- FAO. (2002). Declaration of The World Food Summit: Five Years Later, International Alliance Against Hunger. *Food and Agriculture Organization of The United Nations*.
- Gaudart, Aqil & Pasha, J. (2024). Dynamics between Actors and Interest Groups in an Environmental Politics Perspective: Case Study of Food Estate Development in Kalimantan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 8 No.
- Gewati, M. (2018). Data Produksi Beras BPS dan Kementan Berbeda, Ini Penjelasannya. *Kompas.Com*.
- Ginting, L., & Pye, O. (2013). Resisting agribusiness development: The merauke integrated food and energy estate in West Papua, Indonesia. *ASEAS-Austrian Journal of South East Asian Studies*.
- Gusman, H. (2022). Membedah Data Produksi Beras yang Simpang Siur. *Tirto.Id*.
- Haryanto, G., & Wahono, F. (2004). Kronologi Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Cinderelas*.
- Hasan, A. (2017). Nawa Cita dan Kedaulatan Pangan Indonesia: Pembuktian Seorang Joko Widodo. *Seward.Com*.

- Hasan, N. (2015). Analysis of Soybean Production and Demand to Develop Strategic Policy of Food Self Sufficiency: A System Dynamics Framework. *Procedia Computer Science*.
- Hermanda, A. (2022). *Keluhan Presiden atas Impor*.
- Hermanda, A. (2023). Transkrip Wawancara Serikat Petani Indonesia.
- Hidayatulloh, W., & Koestiono, D. (2021). Dampak Program Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE) Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*.
- Hutabarat, L. (2022). POTENSI KERJA SAMA RI-MERCOSUR TERKAIT DIVERSIFIKASI IMPOR PANGAN GANDUM DAN DAGING SAPI. *Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri*.
- Hydayat, F. H. (2017). Motivasi Indonesia Melakukan Kerja Sama Impor Daging Kerbau Dengan India. *Journal of Operations Management*.
- Idris, M. (2021a). Janji Jokowi Bawa RI Swasembada Kedelai dalam 3 Tahun dan Realisasinya. *Kompas.Com*.
- Idris, M. (2021b). Mengapa Indonesia Begitu Bergantung Pada Kedelai Impor dari AS? *Kompas.Com*.
- Idris, M. (2022). Terus-terusan Impor, Apa Kabar Janji Jokowi soal Swasembada Kedelai? *Kompas.Com*.
- Ihsanuddin. (2020). Jokowi Akan Tambah Lokasi "Food Estate" di Sumsel, NTT, dan Papua. *Kompas.Com*.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/11233051/jokowi-akan-tambah-lokasi-food-estate-di-sumsel-ntt-dan-papua>
- Indonesia.GO.ID. (2017). Kementan: Kebijakan Pangan untuk Sejahterakan Petani. *Portal Informasi Indonesia*.
- Indonesia For Global Justice. (2015). Indonesia dan Traktat Kemitraan Trans-Pasifik. Indonesia For Global Justice. <https://igj.or.id/2015/10/17/indonesia-dan-traktat-kemitraan-trans-pasifik/>.
- Indonesia For Global Justice. (2020). RUU Cipta Kerja Adopsi Rezim Pasar Bebas Yang Mengancam Kedaulatan Petani dan Pangan Nasional. Indonesia For Global Justice.
- Irawan, M. P. I. (2023). Politik Implementasi Kebijakan Pangan: Kontradiksi Kebijakan Komoditas Jagung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal (JDPL)*.
- Jalal, A. (2022). Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras tahun 2018 dan tahun 2021. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*.
- Jong, H. (2020). Indonesia's 'militarized agriculture' raises social, environmental red flags. Mongabay: Situs Berita Lingkungan. <https://news.mongabay.com/2020/10/indonesia-militarized-agriculture-food-estate-kalimantan-sumatra/>
- Kaskus.com. (2021). Rizal Ramli Soal Jusuf Kalla: Dipecat Gus Dur karena Main Impor Beras. *Kaskus.Com*.

- Kelana, A., & Khusniah, U. (2015). Sengkarut Penanganan Makanan Berbahaya. *Gatra*.
- Kementerian Pertanian. (2019). *Laporan Kinerja*.
- Kementerian Pertanian RI. (2021). *Rancangan Umum Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani*.
- Kompas.com. (2015). Ideologi Jadi Penggerak. KOMPAS.
- Kurniawan, Y. Y., Daerobi, A., Sarosa, B., & Pratama, Y. P. (2018). ANALYSIS OF SUSTAINABLE FOOD HOUSE AREA PROGRAM AND THE RELATIONSHIP WITH FOOD SECURITY AND HOUSEHOLD WELFARE (CASE STUDY IN SURAKARTA CITY). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Kurosawa. (1993). Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945. *Grasindo*.
- Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi Politik Dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*.
- Lasminingrat, L., & Efriza, E. (2020). The Development of National Food Estate: The Indonesian Food Crisis Anticipation Strategy. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.
- Laucereno, S. F. (2018). Mendag: yang Diimpor Itu Beras Khusus. *Detik.Com*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Sepakati RI Gabung TPP, Jokowi Dituding Khianati Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12369>
- Manurung, H., & Rezasyah, T. (2021). Indonesia under Dutch East Indies Cultuurstelsel. *ResearchGate*.
- Mardatila. (2020). Tujuan Tanam Paksa, Pengertian dan Sejarah Diberlakukannya. *Merdeka.Com*.
- Margianto, H. (2015). Elnino, Pemerintah Kembali Impor Beras 1,5 Juta Ton dari Thailand', *kompas.com*, 24 September. Kompas.Com.
- Margono, S. (2010). Sejarah Pangan di Indonesia. *Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata Direktorat Geografi Sejarah*.
- Maula, F. A. (2023). *KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI IMPOR GANDUM INDONESIA DARI UKRAINA PASCA PECAHNYA KONFLIK RUSIA-UKRAINA*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46363/19323135.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Maulana. (2024). Transkrip Wawancara Indonesia for Global Justice.
- Merilee S. Grindle. (1980). Public Choices and Policy Change: The Political Economy Of Reform In Developing Countries. *London: The Johns Hopkins University Press*.
- Midhol, A. B. (2022). *KONFLIK RUSIA-UKRAINA DAN PERAN PEMERINTAH INDONESIA*.
- Mongabay Indonesia. (2023). Report: Indonesia's 'food estate' program repeating failures of past projects. Mongabay: Situs Berita Lingkungan. <https://news.mongabay.com/2023/04/report-indonesias-food-estate-program-repeating-failures-of-past-projects/>
- Musilah, R. N., Putri, T. A., & Utami, A. D. (2021). *AKTIVITAS DAN*

- BIAYA PRODUKSI USAHATANI PADI PADA PROGRAM UPSUS PAJALE DI KABUPATEN DEMAK. *Forum Agribisnis*.
- Mutia, A. N. A., Nurlinda, I., & Astriani, N. (2022). Pengaturan Pembangunan Food Estate Pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*.
- Nawiyanto. (2013). Politik Pangan dan Ketahanan Pangan pada masa Orde Lama Indonesia (1945-1965). *Universitas Jember*.
- Nita, S. (2016). TPP (Trans-Pacific Partnership): Manfaat atau Ancaman. Indonesia AIDS Coalition. <https://iac.or.id/id/tpp-trans-pacific-partnership-manfaat-atau-ancaman/>
- Olivia, Y. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Pasaribu, Q. (2023). Food estate: Perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektare sawah tak kunjung panen di Kalteng. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>
- Permadi. (2015). Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang. *Avatara*.
- Permana, S. H. (2022). Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Perekonomian Indonesia. *Pusat Penelitian DPR RI*, 14(5).
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2018). Perbandingan Kebijakan Pangan Era Pemerintahan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*.
- Prasetyani, I., & Widiyanto, D. (2013). STRATEGI MENGHADAPI KETAHANAN PANGAN (Dilihat Dari Kebutuhan Dan Ketersediaan Pangan) PENDUDUK INDONESIA DI MASA MENDATANG (Tahun 2015 – 2040). *Jurnal Bumi Indonesia*.
- Prasiska. (2018). Horok-Horok Pengganti Makanan Pokok Masyarakat Jepara Pada Masa Pendudukan Jepang. *Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Prawiro. (2004). Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi. *PT. Primamedia Pustaka*.
- Priatmojo, D., & Aulia, A. (2022). Food Estate Jokowi di NTT Gagal Total, Ini Faktanya. *Viva.Co.Id*. <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1470253-food-estate-jokowi-di-ntt-gagal-total-ini-faktanya>
- Primadhyta, S. (2017). India Gusur Jepang Jadi Negara Tujuan Ekspor Terbesar RI. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170315133814-92-%0A200283/india-gusur-jepang-jadi%02negara-tujuan-ekspor-terbesar-ri/>
- Purnajati, R. (2021). Dorong Produktivitas Petani, "Food Estate" Dicanangkan di Sumsel. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/29/dorong-produktivitas-petani-food-estate-dicanangkan-di-sumsel/>
- Purnamasari, M., Huang, W.-C., & Priyanto, B. (2023). The Impact of Government Food Policy on Farm Efficiency of Beneficiary Small-Scale Farmers in Indonesia. *Agriculture*.

- Purwaatmoko, S. (2015). Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Partai Politik Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan. *Insignia*.
- Putra, A., & Ika, A. (2021). 9 Daerah di Sumsel Jadi Lokasi "Food Estate", Apa Manfaatnya? *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/05/070807878/9-daerah-di-sumsel-jadi-lokasi-food-estate-apa-manfaatnya>
- Putra, I. N. G. D. S., & Sukadana, I. W. (2021). Pengaruh Produksi, Inflasi, Dan Kurs Dollar Amerika Serikat Terhadap Impor Kedelai Indonesia. *E-Jurnal EP Unud*.
- Putri, A. (2019). Pengagendaaan Isu Pangan Sebagai Isu Pangan Pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Studi Pada Kebijakan Food Estate. *Universitas Pertamina*.
- Raharjo, W. (2014). Globalisasi & Pembangunan Karakter Bangsa. Trisakti.
- Rahmadi, R. (2015). 100 Hari Jokowi—JK: Pakar Pertanian Ragukan Nawa Cita Tercapai, Jika Syarat-Syarat Ini Tidak Terpenuhi. Mongabay: Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2015/03/12/100-hari-jokowi-jk-pakar-pertanian-ragukan-nawa-cita-tercapai-jika-syarat-syarat-ini-tidak-terpenuhi/>
- Rahman. (2016). Rijsttafel: Budaya Kuliner Di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942. *Pt. Gramedia Pustaka Utama*.
- Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*.
- Ratnawati, E. (2023). Mentan Genjot Peningkatan Produksi Padi-Jagung Wujudkan Swasembada. *Antara.Com*.
- Rohmaniyah, A. (2020). Politik Impor Beras Dan Kedaulatan Pangan Pemerintahan Joko Widodo 2014–2019.
- Rozaki, Z. (2020). COVID-19, Agriculture, and Food Security in Indonesia. *Reviews in Agricultural Science*.
- Safitri, D. (2014). Representasi Nawa Cita dalam 100 Hari Kabinet Kerja Jokowi-JK. *Kompas.Com*.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*.
- Santosa, Y., & Irawan, H. (2023). Sejarah Perkembangan Makanan Indonesia Dari Abad Ke 10 Hingga Masa Pendudukan Jepang. *Universitas Indrasprasta PGRI*.
- Saragih, J. (2017). Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan. *Pusat Penelitian DPR RI*.
- Saridewi, T. R. (2018). Peningkatan Produktivitas Padi, Jagung Dan Kedelai Melalui Program Upsus Pajale Di Kabupaten Garut. *Jurnal Agroteknologi Dan Agribisnis*.
- Sastrosupadi, A. (2019). Ketahanan Pangan dan Beberapa Aspeknya. *Buana Sains*.
- Sato, S. (1997). The Pangreh Praja in Java under Japanese Military Rule. *Peter Post*.
- Shafiani, F. (2019). Implementasi Program UPSUS PAJALE (Upaya

- Khusus Padi Jagung Kedelai Dalam Rangka Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
- Silitonga. (1997). 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. *Badan Urusan Logistik*.
- Simamora, B., Lubis, K., & Arini, H. (2021). Analisis Asumsi-Asumsi Pada Program Food Estate di Papua. *Perspektif*.
- Simanjuntak, Atmaezer. H., & Erwinsyah, Rudy. G. (2020). Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaprojek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*.
- Sinaga. (2023). Transkrip Wawancara Badan Pangan Nasional.
- Soekirman. (2004). Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII. Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. *Lembaga Pengetahuan Indonesia*.
- Sondarika. (2015). Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia Dari Tahun 1830-1870. *Artefak*.
- Stefany, Y. (2021). Menyoal Food Estate di Sumatera. *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/19/menyoal-food-estate-di-sumatera-utara/>
- Sukmana, Y. (2016). Jajaki Impor Beras dari Negara Lain karena Tak Ingin Tergantung pada Thailand dan Vietnam. *Kompas.Com*.
- Suksmantri, E. (2012). *BULOG Dalam Kebijakan Perberasan Nasional. Penerbit CV.Padma*.
- Supriyono. (2016). Panca Usaha Tani. *Makalah, Program Studi Agroteknologi, Fak.Pertanian Universitas Kadri, Kediri*.
- Suryana. (2002). World Food Summit: Aliansi Internasional Mengikis Kelaparan. *KOMPAS*.
- Suryana, A. (2008). *Menelisik ketahanan pangan, kebijakan pangan, dan swasembada beras. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*.
- Suryana, A. (2014). Proses dan Dinamika Penyusunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pangan*.
- Suryana, A., Rachman, B., & Hartono, M. D. (2014). Dinamika Kebijakan Harga Gabah dan Beras Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Pengembangan Inovasi Pertanian*.
- Suryanto &, & Widiarta. (2010). Kebijakan Pengebangan Kedelai Nasional. Prosiding Simposium dan Pameran Teknologi Aplikasi Isotop dan Radiasi. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan*.
- Suryawati, I. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Indonesia dalam Konstruksi Media (Analisis Framing Pada Berita Tirto.Id). *Jurnal KOMUNIKATIF*.
- Syafruddin, A., Kamahi, S. B., Nami, Y. J., & Baso, B. T. (2023). FOOD ESTATE DALAM PERSPEKTIF POLITIK PERTAHANAN NEGARA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal*

- Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan.*
- Syamsi, S. S. (2015). Nawa Cita Jokowi-JK Dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi. *Surya Octagon Interdisciplinary Journal of Technology*.
- Tempo.co. (2022). *Perang Rusia-Ukraina dan Krisis Pangan.*
- Thomas, V. F. (2021). Pemerintah akan Alokasikan Rp3,9 Triliun untuk Food Estate di 2022. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/pemerintah-akan-alokasikan-rp39-triliun-untuk-food-estate-di-2022-gehV>
- Timmer, C. P. (2012). Behavioral dimensions of food security. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(31), 12315–12320.
- Timmer, C. P. (2014). Food Security in Asia and the Pacific: The Rapidly Changing Role of Rice. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 1(1), 73–90.
- Timmer, P. (2004). Food security and economic growth: an Asian perspective. *Center for Global Development Working Paper*, 51.
- viva.co.id. (2014). Profil Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP. <https://www.viva.co.id/siapa/read/20-dr-ir-h-andi-amran-sulaiman-mp>
- Waddel, S. (2009). Rising the Challenge of Providing Legal Protection for the Indonesian Coastal and Marine Environment. *Indonesia Beyond The Water Edge: Managing on Archipelagic State*.
- Walhi Kalimantan Tengah. (2021). Food Estate, Menjalankan Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Perkebunan Kalimantan. Walhi Kalteng.
- Walhi Kalimantan Tengah. (2022). *Dianggap Gagal, Walhi Kalteng Desak Pemerintah Hentikan Program Food Estate di Kalimantan Tengah*. <https://walhikalteng.org/2022/10/10/press-releasedianggap-gagal-walhi-kalteng-desak-pemerintah-hentikan-program-food-estate-kalimantan-tengah/>
- Wicaksono, R. A. (2022). *Food Estate Sumatera Utara untuk Apa dan Siapa?* <https://betahita.id/news/detail/7192/food-estate-sumatera-utara-untuk-apa-dan-siapa-.html?v=1656082932>
- Widyastuti, A. Y. (2018). Rizal Ramli Kritik Jokowi, dari Makro Ekonomi Hingga Impor Beras. *Tempo.Co*.
- Wulandari, G., Hodijah, S., & Amzar, Y. V. (2019). Impor Gandum Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*.
- Zulfitriyana, Syarfi, I. W., & Hasnah. (2020). The Application of Upsus Pajale Program Technology on Rice. *European Journal of Agriculture and Food Sciences*.